BAB III

OBYEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kota Bandung

3.1.1 Transportasi di Kota Bandung

Kondisi transportasi jalan di kota Bandung masih buruk dengan tingginya tingkat kemacetan serta ruas jalan yang tidak memadai, termasuk masalah parkir dan tingginya polusi udara. Permasalahan ini muncul karena beberapa faktor diantaranya pengelolaan transportasi oleh pemerintah setempat yang tidak maksimal seperti rendahnya koordinasi antara instansi yang terkait, ketidakjelasan wewenang setiap instansi, dan kurangnya sumber daya manusia, serta ditambah tidak lengkapnya peraturan pendukung.

Panjang jalan di kota Bandung secara keseluruhan baru mencapai 4.9 % dari total luas wilayahnya dengan posisi idealnya mesti berada pada kisaran 15-20 %. Pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas jalan dan penataan kawasan mesti menjadi perhatian bagi pemerintah kota untuk menjadikan kota ini menjadi kota terkemuka. Pada 25 Juni 2005, jembatan Pasupati resmi dibuka untuk mengurangi kemacetan di pusat kota dan menjadi landmark baru bagi kota ini. Jembatan dengan panjangnya 2.8 km ini dibangun pada kawasan lembah serta melintasi Ci Kapundung dan dapat menghubungkan poros barat ke timur di wilayah utara kota Bandung.

Kota Bandung berjarak sekitar 180 km dari Jakarta, saat ini dapat dicapai melalui jalan Tol Cipularang (Cikampek-Purwakarta-Padalarang) dengan waktu tempuh antara 1.5 jam sampai dengan 2 jam. Jalan tol ini merupakan pengembangan dari jalan Tol Padaleunyi (Padalarang-Cileunyi), yang sudah dibangun sebelumnya.

Transportasi di dalam kota biasanya menggunakan angkutan kota atau yang lebih akrab disebut angkot. Selain itu, bus kota dan taksi juga menjadi alat transportasi di kota ini. Sedangkan sebagai terminal bus antarkota dan provinsi di kota ini adalah terminal Leuwipanjang untuk rute barat dan terminal Cicaheum untuk rute timur.

TMB (Trans Metro Bandung) resmi beroperasi Pada 24 September 2009. walaupun sempat diprotes oleh sopir angkot setempat. TMB ini merupakan proyek patungan antara pemerintah kota Bandung dengan Perum II DAMRI Bandung serta Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam memberikan layanan transportasi massal dengan harga murah, fasilitas dan kenyamanan yang terjamin serta tepat waktu ke tujuan.

3.1.2 Jumlah kendaraan beroda empat Berdasarkan data Kependudukan di Kota Bandung.

Penduduk Kota Bandung berdasarkan hasil Susenas tahun 2010 adalah 2.228.268 jiwa (penduduk perempuan 1.113.267 Jiwa dan penduduk laki-laki1.115.001 jiwa). Rata-rata kepadatan penduduk Kota Bandung 13.367 jiwa/Km2. dilihat dari segi kepadatan penduduk per Kecamatan, maka Kecamatan

Bojongloa Kaler merupakan daerah terpadat dengan kepadatan penduduk 38.149 jiwa/Km2. Sedangkan untuk kepemilikan kendaraan beroda empat adalah 4290 per kecamatan atau sekitar 670 unit kendaraan beroda empat per kelurahan.

3.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bandung

3.2.1 Sejarah Singkat Mengenai Dinas Perhubungan Kota Bandung

Kota Bandung merupakan ibukota propinsi Jawa Barat disamping sebagai pusat pemerintahan, Kota Bandung juga merupakan pusat perdagangan, bisnis, jasa, pendidikan dan tujuan wisata dari berbagai daerah. Dengan menyandang berbagai fungsi kota ini, tentu diperlukan perhatian dan juga penanganan yang intens guna ikut mendukung peningkatan pelayanan masyarakat di bidang sarana transportasi lalu lintas dan angkutan jalan.

Transportasi merupakan suatu alat yang menjadi urat nadi perekonomian, karena transportasi merupakan sarana untuk memperlancar kegiatan masyarakat dalam mendistribusikan barang dan jasa. Dalam lingkup kota, transportasi adalah unsur keindahan dan kenyamanan kota. Dewasa ini transportasi tidak hanya merupakan kegiatan memindahkan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, tapi tranportasi juga sudah menjadi unsur utama pembentuk kota. Maka suatu kota dikatakan baik jika memiliki transportasi yang lancar, aman, nyaman, murah, tertib dan terkendali. Sebaliknya kota yang semrawut dapat diakibatkan oleh transportasi yang semrawut pula.

Sejalan dengan tujuan terciptanya sarana transportasi yang baik maka pelaksanaan pembangunan sektor ini diarahkan untuk :

1. Meningkatkan peranan sistem transportasi dalam memenuhi kebutuhan mobilisasi manusia, barang dan jasa.
2. Memperluas jaringan transportasi yang menjangkau seluruh wilayah.
3. Tersedianya pelayanan transportasi yang memadai guna mendukung industri, jasa perdagangan, pariwisata dan pertanian.

Selanjutnya melalui tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang mempunyai kewenangan teknis untuk menangani permasalahan dibidang perhubungan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka Dinas Perhubungan Kota Bandung ditantang untuk mampu menghadapi permasalahan-permasalahan di masa yang akan datang melalui visi "Terwujudnya sistem transportasi kota yang lebih baik untuk mendukung Kota Bandung sebagai kota Jasa yang Bermartabat".

3.2.2 Dasar Hukum Dinas Perhubungan Kota Bandung

Dasar hukum yang dipakai sebagai landasan operasional Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

a. PERDA Kota Bandung No. 2 tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.
b. PERDA Kota Bandung No. 13 tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

c. PERDA Kota Bandung No. 02 tahun 2008 tentang penyelenggaraan perhubungan di Kota Bandung
d. PERDA Kota Bandung No. 12 tahun 2008 tentang Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan.
e. Peraturan Walikota No. 475 / 2008 tentang Tugas pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemda Kota Bandung.
f. Keputusan Walikota No. 1230 /2001 tentang Juknis pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ,Penyelenggaraan Bengkel Umum, Lembaga Teknis Penguji, Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Mengemudi dan Kegiatan Bongkar Muat Barang Di Kota Bandung.
g. Keputusan Walikota Bandung No. 1714 Tahun 2001 tentang Petunjuk Penyelenggaran Perhubungan Di Kota Bandung
h. Peraturan Walikota Bandung Nomor 402 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sub Unit Pengelolaan Terminal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung.
i. Undang-undang no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/MENLH/8/2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
k. Peraturan Daerah Kota Bandung no. 03 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
l. Peraturan Daerah Kota Bandung no. 02 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung.

m. Peraturan Daerah Kota Bandung no. 12 tahun 2008 tentang Retribusi di Bidang Perhubungan di Kota Bandung.
n. Peraturan Walikota Bandung no. 572 tahun 2010 tentang Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

3.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional
3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Pelaksanaan tupoksi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung secara umum dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun di dalam pelaksanaannya di lapangan sering kali mengalami kendala diantaranya:

1. Masih terjadinya kemacetan lalu lintas
2. Masih banyaknya keluhan masyarakat tentang keluhan pelayanan umum baik masalah keamanan, kenyamanan, pentaripan dan persoalan disiplin pengemudi yang masih kurang.
3. Masih seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman pengemudi terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas. Hal ini sering menimbulkan gangguan tidak saja kepada yang bersangkutan juga kepada pengguna jalan yang lain.
4. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan RPPJ)
5. Masih banyaknya badan jalan yang tidak digunakan untuk kegiatan arus lalu lintas (PKL dan pasar tumpah)
6. Adanya kewenangan propinsi dan pusat di bidang Postel yang belum sepenuhnya diserahkan ke kabupaten / kota.
7. Pemakaian jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
8. Kurangnya lahan parkir atau penempatan parkir tidak sesuai dengan tempatnya.

9. Kurangnya kesadaran pengemudi atau pemilik kendaraan dalam melaksanakan wajib uji sehingga masih ada kendaraan yang tidak laik jalan tetap beroperasi.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas, ada beberapa strategi dan kebijakan dalam pemecahan masalah, yaitu :

(1). Rekayasa dan manajemen lalu lintas

a. Rekayasa dan manajemen lalu lintas yang sudah selesai dilakukan adalah 69 titik kemacetan dari 72 titik. Sisa yang belum diselesaikan adalah 3 titik yaitu :

- Ledeng (dalam tahap optimalisasi fungsi jalan)
- Jl. A. Yani, sekitar terminal Cicaheum (dalam tahap pelebaran jalan)
- Jl. Kopo (dalam upaya peningkatan menjadi *fly over*)

b. Penataan ulang desain jaringan pada jalan utama kota

c. Menyediakan rambu dan marka jalan

d. Menyediakan pemberhentian angkutan umum (*Bus Shelter*)

e. Koordinasi lampu lalu lintas

f. Pengelolaan perparkiran, khususnya parkir *on street* pada beberapa ruas jalan.

g. Penertiban PKL dan pengaturan lalu lintas pasar tumpah diantaranya adalah :

- Jl. Peta
- Dago simpang
- Jl. Otto Iskandardinata

- Jl. Pajajaran
- Jl. Cihampelas

h. Pengendalian parkir sisi jalan (parkir di buat sejajar dan pengurangan parkir di badan jalan).

(2). Manajemen Angkutan Umum

a. Pengembangan angkutan umum massal. Dalam tahun 2009 Dishub Kota Bandung telah melakaksanakan pengoperasian *Bus Lane* sebanyak 10 unit bis melayani koridor 1 Cibiru-Cibeureum.

b. Meningkatkan integrasi pelayanan antar moda angkutan umum baik angkutan jalan raya, kereta api, maupun moda transportasi lainnya.

(3). Meningkatkan dan mengembangkan *traffic safety*

a. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor

b. Peningkatan pendidikan pengemudi

c. Pembinaan bengkel umum kepada kendaraan bermotor

(4). Infrastruktur

a. Pembuatan jembatan penyeberangan dan perbaikan trotoar

b. Menghilangkan pangkalan liar

c. Penerapan Sistem lalu lintas satu arah untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan

d. Pemasangan rambu-rambu *bus stop* (150 buah)

(5). Dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Postel Dishub Kota Bandung berkoordinasi dengan Dishub Propinsi untuk menghindari

adanya tumpang tindih kewenangan yang berkaitan dengan Tugas Subdin Postel Dishub Kota Bandung.

Sedangkan hal-hal lain yang ditempuh oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

1) Penyuluhan sosialisasi kepada pengemudi angkutan umum tentang tertib berlalu lintas.
2) Operasi gabungan Penertiban angkutan umum dan Taksi (berkoordinasi dengan Polri, Metrologi, POMDAM, Garnisun)
3) Sosialisasi Perda K- 3 (bidang perhubungan) :
   - Pengaturan daerah pengoperasian becak.
   - Pelarangan merusak fasilitas perlengkapan jalan (rambu, *traffic light*).
   - Pelarangan penggunaan badan jalan sebagai garasi dan cuci kendaraan.
   - Pelarangan menyeberang jalan dan berhenti kendaraan angkutan umum disembarang tempat.
   - Mewajibkan kendaraan angkutan umum menyediakan tempat sampah
   - Pelarangan pengotoran jalan pada unit kendaraan proyek.
4) Pembentukan Tim Penelitian dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
5) Penyusunan *Masterplan* Transportasi (sedang dilaksanakan/proyek Bappeda 2009)
6) Bekerjasama dengan PT. KAI menghidupkan kembali pelayanan jaringan kereta api jarak pendek (Bandung - Soreang, Bandung – Majalaya, Bandung – Ciwidey).

3.2.4 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bandung

Dinas Perhubungan adalah instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan instansi tekhnis yang menangani dibidangnya berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku mempunyai tantangan untuk menghadapi masa yang akan datang melalui visi yang memfungsikan peran perhubungan guna menunjang setiap program pembangunan dan pemerintahan di Kota Bandung.

Visi Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu Terwujudnya sistem transportasi kota yang lebih baik untuk mendukung Kota Bandung sebagai kota Jasa yang Bermartabat

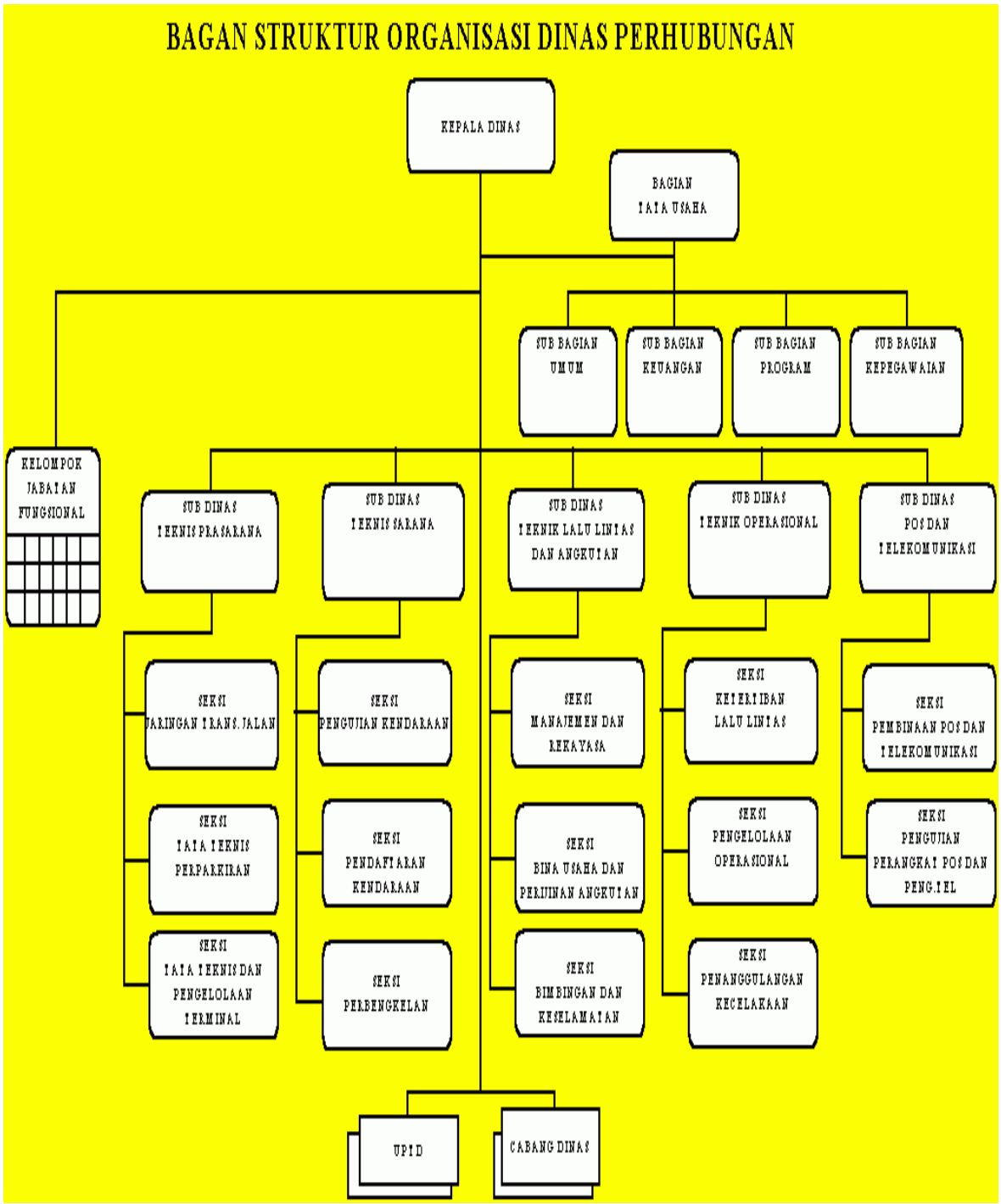
Untuk mencapai visi ini maka misi yang dirumuskan adalah :

a. Mengendalikan aspek-aspek penyebab kemacetan.
b. Mengembangkan SAUM (Sarana Angkutan Umum Massal) dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor.
c. Meningkatkan kelaikan pengoperasian sarana angkutan umum dan barang.
d. Meningkatkan parasarana transportasi yang memadai seperti terminal, dan fasilitas perlengkapan jalan.
e. Meningkatkan profesionalisme aparat Dinas Perhubungan Kota Bandung.

3.1.5 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung

Berikut ini adalah struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung beserta penjelasannya:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2011.

1. SEKRETARIAT

A. Data Pegawai :

Karyawan Dinas Perhubungan Kota Bandung terdiri dari 362 PNS dan 141 orang CPNS dengan jumlah total sebanyak 503 pegawai.

Jumlah PNS berdasarkan Golongan :

1. Golongan IV : 7 Orang
2. Golongan III : 123 Orang
3. Golongan II : 301 Orang
4. Golongan I : 72 Orang

Jumlah PNS berdasarkan klasifikasi pendidikan :

- Doktor : 1 Orang
- Pasca Sarjana : 11 Orang
- Sarjana : 60 Orang
- Sarjana Muda / D3 : 9 Orang
- D2 : 4 Orang
- SLTA : 334 Orang
- SLTP : 41 Orang
- SD : 43 Orang

Esselonering Dinas Perhubungan :

Kepala Dinas (Eselon IIb) : 1 Orang
Sekretaris (Eselon IIIa) : 1 Orang
Kabid (Eselon IIIb) : 4 Orang
Kasubag (Eselon IVa) : 2 Orang
Kasie (Eselon IVa) : 8 Orang
Ka UPTD (Eselon IVa) : 3 Orang
Kasubag TU (Eselon IVb) : 3 Orang

Jumlah Staf perbengkelan berdasarkan Golongan :

Golongan IV : 2 Orang

Golongan III : 11 Orang

Golongan II : 17 Orang

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang telah tercatat dibagian kepegawaian adalah sebagai berikut:

a) Lingkup Keuangan dan Program

Penataan masalah keuangan yang mencakup berbagai kegiatan meliputi : Pengusulan, penerimaan, pengeluaran dan pengarsipan laporan-laporan income dari unit kerja penghasil, pembuatan laporan target dan realisasi income. Sumber keuangan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung ada tiga , yaitu

1) Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 16.719.089.993 dengan realisasi sebesar Rp. 15.759.541.206,- atau sebesar 94,26%
2) Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 15.526.523.400 dengan realisasi sebesar Rp. 13.454.074.295,- atau sebesar 86,65%
3) Anggaran Pendapatan dengan target sebesar Rp. 16.939.472.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.937.792.500,- atau sebear 99,99 %

Penataan masalah lingkup Keuangan dan Program yang mencakup:

1. Pembuatan Renja (Rencana Kerja) Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2010
2. Pembuatan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) tahun 2010
3. Pembuatan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2010
4. Pembuatan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) tahun 2010
5. Pembuatan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah) tahun 2009

b) Lingkup Umum dan Kepegawaian

1) Kegiatan Administrasi Umum, meliputi :

a) Telah melakukan pengelolaan surat masuk sebanyak 1.459 buah
b) Telah melakukan pengelolaan surat keluar sebanyak 1.001 buah
c) Pemeliharaan Kebersihan Kantor dan Taman
d) Pendistribusian Barang ke setiap unit kerja di Dishub Kota Bandung
e) Pelaksanaan Keprotokolan dan Kehumasan
f) Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)
g) Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan
h) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
i) Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
j) Pelaburan Gedung Utama Termina Leuwi Panjang
k) Pelaksanaan Rapat Dinas
l) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
    1. Roda Empat sebanyak 32
    2. Roda dua sebanyak 54
m) Mengikuti Lomba Kendaraan Hias dalam rangka HUT Kota Bandung
n) Mengikuti Pameran di Braga City Walk dalam rangka HUT Kota Bandung
o) Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor
p) Pengadaan Instalasi Listrik berupa kabel dan lampu
q) Pemasangan CCTV di Terminal Leuwi Panjang

c) Kegiatan Kepegawaian, meliputi :

a. Telah menyelesaikan pembuatan Budzething Pegawai
b. Telah menyelesaikan Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
c. Telah menyelesaikan Pembuatan Penjagaan Kenaikan Pangkat
d. Telah menyelesaikan Pembuatan Penjagaan Gaji Berkala
e. Telah menyelesaikan Pembuatan Penjagaan Pensiun

f. Telah menyelesaikan pembuatan DP3 tahun 2008 bagi 523 orang PNS dan memproses pembuatan DP3 tahun 2009 di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung
g. Telah menyelesaikan kenaikan pangkat regular berdasarkan PP No. 12 Tahun 2005 untuk periode April 2009 sebanyak 17 orang PNS dan periode Oktober 2009 sebanyak 10 orang PNS
h. Telah menyelesaikan permohonan pensiun bagi 24 orang PNS
i. Telah menyelesaikan kenaikan gaji berkala PNS periode bulan Januari s/d Desember 2009 sebanyak 153 orang
j. Telah melaksanakan tugas rutin yaitu :
   (1). Pembuatan daftar hadir setiap akhir bulan
   (2). Pembuatan daftar hadir apel pagi setiap hari
k. Memproses, menyiapkan dan menyelesaikan Surat Edaran, Surat Undangan, Surat Perintah sesuai dengan keperluan dalam menjalankan kegiatan dinas.
l. Mengajukan, memproses, menyiapkan berbagai jenis diklat / bintek :
   I. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) sebanyak 5 orang
   II. Diklat Pra jabatan sebanyak 124 orang CPNS formasi 2007
m. Mengadakan penataan kearsipan pada bidang kepegawaian.
n. Telah menyelesaikan pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi tahun 2009 sebanyak 30 orang
o. Telah memproses pembuatan TASPEN bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2009 sebanyak 154 orang

2. BIDANG SARANA

1. Melaksanakan pelayanan Pengujian kendaraan bermotor.
2. Persiapan pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam rangka perizinan Sekolah Mengemudi Kendaraan Bermotor.
3. Melaksanakan Uji Emisi Gas Buang sebanyak 1000 kali kegiatan di 2 lokasi dengan jumlah kendaraan yang melaksanakan uji emisi sebanyak 1000 kendaraan / unit.

4. Pembuatan model dan formulir yang akan digunakan didalam penyelenggaraan bengkel umum (Sertifikat, stiker Uji Emisi).
5. Pengembangan komputerisasi dengan sistem digital atau *online* antara pendaftaran kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor serta perbengkelan kendaraan dengan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan masing-masing seksi.

3. BIDANG LALU LINTAS DAN PARKIR

1. Pemeliharaan ATCS, yang terdiri dari:
   a. Pengadaan perlengkapan lampu lalu lintas :
      - Lampu pijar *traffic light* (60 watt dan 100 watt)
      - Kabel komunikasi (1 pair dan 20 pair)
      - Primary dan secondary hood
      - Lensa aspek
      - Headheld
   b. Pemeliharaan peralatan dan perbaikan alat-alat ATCS :
      - Pemeliharaan controller lampu lalu lintas
      - Pengadaan dan pemasangan lampu LED
      - Pengadaan dan pemasangan lampu camera
      - Pemeliharaan lampu, lensa dan visor
      - Pemeliharaan kabel signal dan kabel komunikasi
      - Pengadaan dan pemasangan komputer fax, *reaqpeater*, camera, controller, CCTV, jaringan CC Room dan genset.
2. Pemeliharaan perlengkapan jalan, yang terdiri dari
   - Pengecatan marka jalan sebanyak 2750 m^2
   - Pengadaan rambu-rambu lalu lintas ukuran 60 cm
   - Pengadaan rambu lalu lintas overhead
   - Menyelenggarakan rapat bakorstrans sebanyak 20 kali.
3. Mendukung kegiatan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru

4. Mengikuti kegiatan lomba tertib lalu lintas dalam rangka hari Perhubungan Nasional.

5. BIDANG ANGKUTAN DAN TERMINAL

1. Penataan Tata Teknis Pengelolaan Terminal, yang terdiri dari :
   - Rehabilitasi terminal Leuwipanjang
   - Rehabilitasi sub terminal Ciwastra
   - Rehabilitasi sub terminal Tegalega
   - Pembangunan sub terminal Margahayu

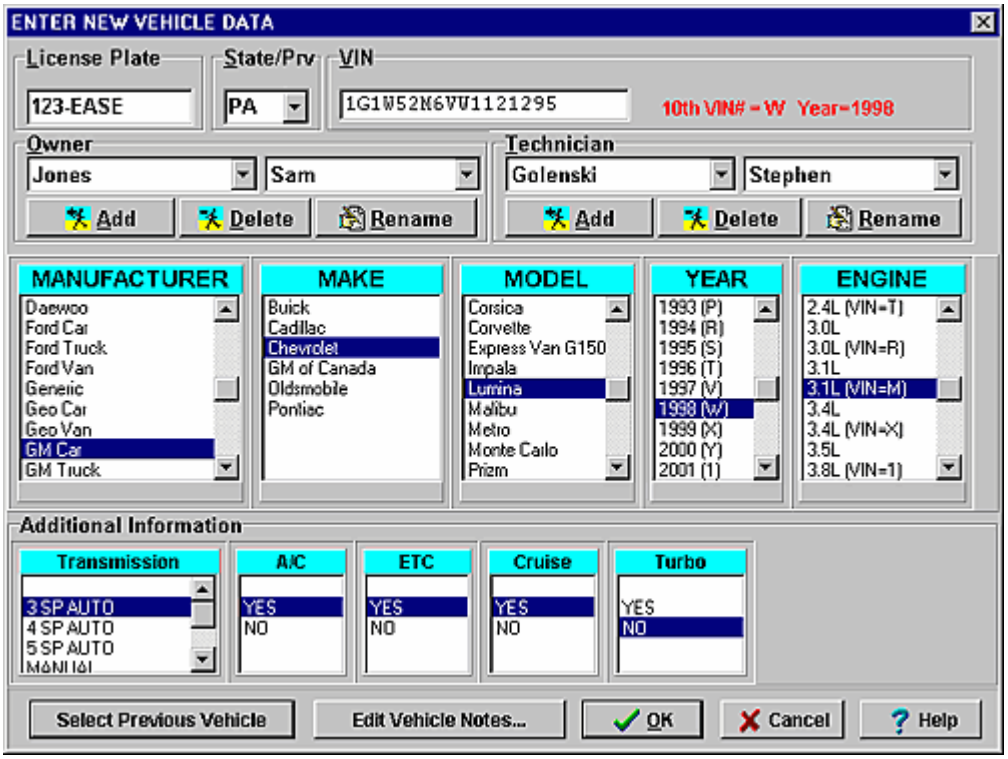
3.3 Gambaran Umum Sistem Informasi Uji Emisi Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Bandung

Sistem Uji Emisi Kendaraan Bermotor adalah layanan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Bandung yang berfungsi sebagai perangkat lunak penunjang utama dalam proses pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor dimana data yang diolah terdiri dari unsur-unsur seperti masukan, pengolahan serta keluaran yang tersusun secara sistematis dalam pelayanan Sistem Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang dilakukan di Bengkel-Bengkel bersertifikasi Resmi Uji Emisi Kendaraan Bermotor.

Kontribusi emisi gas buang kendaraan bermotor pada polusi udara ambient di kota Bandung lebih dari 70%. Baik buruknya udara kota Bandung sangat bertumpu kepada kesadaran para pemilik kendaraan dalam mematuhi ambang batas emisi gas buang yang telah ditetapkan. Sistem informasi uji emisi ini sejatinya merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar *kadar oksigen* dan *carbon dioksida* serta gas-gas metan lain yang dihasilkan oleh kerja sebuah mesin bermotor. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota

Bandung mengambil sampel gas-gas ini dari kendaraan transportasi masyarakat seperti angkutan kota, bis, sepeda motor ataupun kendaraan pribadi lainnya. Bila hasil pembuangan gas-gas tersebut telah melewati ambang batas maka dibutuhkan perawatan dan perbaikan agar tidak menimbulkan pecemaran udara yang berkelanjutan. Berikut adalah tampilan awal dari sistem informasi uji emisi kendaraan bermotor :

Gambar 3.2
Tampilan Awal



Sumber : Sub bidang Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2011

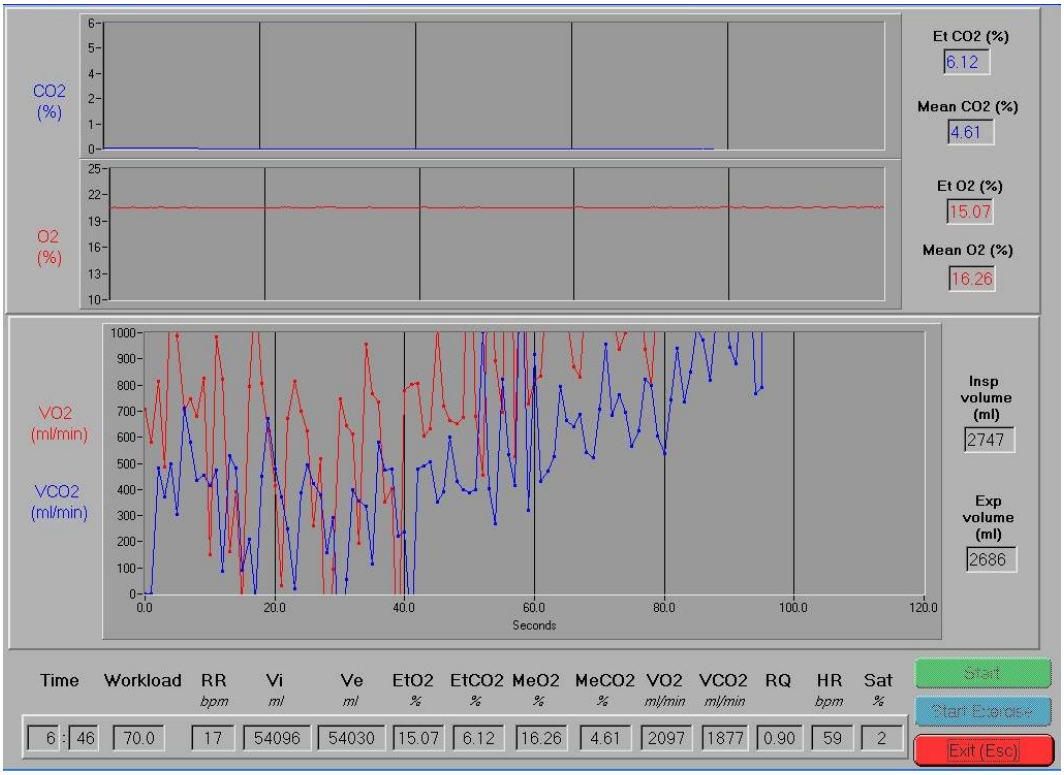
Gambar diatas merupakan tampilan awal dari sistem informasi Uji Emisi Kendaraan Bermotor. Sebelum masuk keproses lebih lanjut, terlebih dahulu para operator diwajibkan untuk mengisi kolom-kolom isian yang harus dilengkapi yaitu berupa :

a. Menu license plate yaitu kolom isian mengenai plat nomor kendaraan bermotor yang akan diuji emisikan
b. Menu state/prv yaitu kolom isian mengenai daerah asal dari mobil tersebut. Biasanya akan terlihat pada huruf awal yang tertera diplat nomor.
c. Menu vin yaitu merupakan kolom isian mengenai nomor mesin dari kendaraan yang akan diuji emisikan.
d. Menu owner merupakan kolom isian yang memperlihatkan nama pemilik dari kendaraan tersebut.
e. Menu technician merupakan kolom berisi nama montir yang sedang mengambil alih pekerjaan uji emisi untuk kendaraan ini.
f. Menu manufacture merupakan kolom yang berisi pilihan mengenai nama-nama pabrikan yang menjadi produsen dari kendaraan yang kita miliki. Disini montir akan memilih salah satu nama pabrikan yang sesuai dengan kendaraan kita.
g. Menu make merupakan kolom yang berisi tentang pilihan dari bentuk kendaraan yang dipergunakan. Termasuk dalam jenis apakah mobil tersebut.
h. Menu model merupakan kolom pilihan yang berisi jenis-jenis merk kendaraan yang diproduksi oleh pabrikan otomotif. Montir akan memilihkan jenis merk yang cocok dengan kendaraan yang sedang kita gunakan.
i. Menu year merupakan kolom pilihan tentang tahun pembuatan kendaraan yang akan kita uji emisikan.

j. Menu engine merupakan kolom isian mengenai silinder dari mesin yang ada dikendaraan yang akan diuji emisikan.

Setelah semua kolom isian yang tersedia selesai diisi, maka tahapan selanjutnya berupa pemantauan serta analisis terhadap gas buang kendaraan bermotor. Disini, kendaraan tersebut akan diperiksa menggunakan sebuah alat yang ditempelkan di knalpot kendaraan yang di uji emisikan. Alat berupa selang ini telah terkoneksi langsung dengan aplikasi sistem informasi uji emisi yang sedang dijalankan bersamaan menggunakan perangkat komputer. Berikut adalah tampilan kedua mengenai analisis gas dari sistem informasi uji emisi kendaraan bermotor :

Gambar 3.3
Analisis Gas

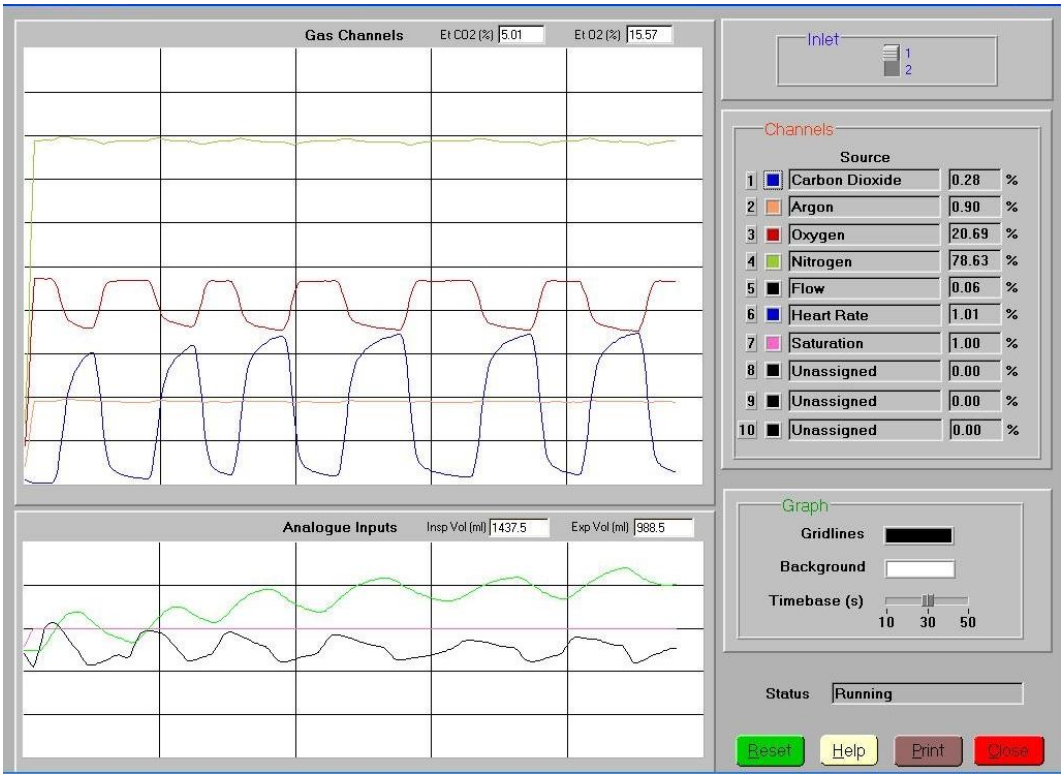


Sumber : Sub bidang Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2011.

Melalui tampilan analisis gas diatas, akan terlihat kuantitas dari gas-gas yang terkandung didalam asap gas buang kendaraan bermotor. Hasil analisis ini dapat memperlihatkan secara jelas mengenai angka dari kandungan *carbondioksida* serta *oksigen* yang dihasilkan dari hasil pembakaran mesin kendaraan yang di uji emisikan. Selain itu juga tampak hasil analisis dari gas-gas metan lain seperti *argon* serta *nitrogen.*

Setelah kegiatan analisis dirasa sudah cukup maka akan berlanjut ketahap berikutnya yaitu tahapan akhir dimana tampilan hasil akan terlihat. Contoh tampilannya adalah sebagai berikut :

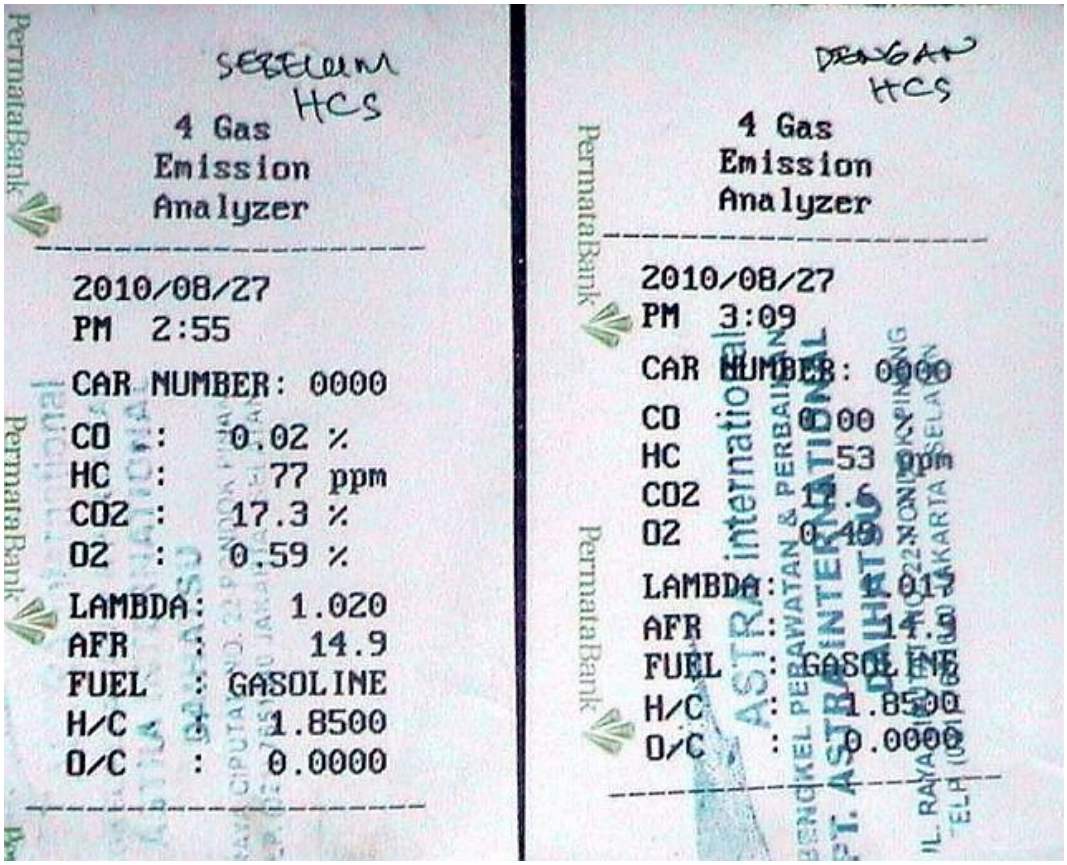
Gambar 3.4
Tampilan Hasil



Sumber : Sub bidang Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2011.

Hasil akhir dari proses uji emisi akan terlihat pada tampilan terakhir ini. Disebelah kanan tampilan terlihat dalam persentase data tentang kandungan gas-gas yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor yang telah diuji emisikan. Data tersebut kemudian di *print* dan diberikan kepada pemilik kendaraan sebagai bukti bahwa kegiatan uji emisi telah dilaksanakan. Apabila menurut montir yang melaksanakan pemeriksaan menganggap gas-gas yang dihasilkan dari proses pembakaran sudah melewati dari ambang batas kewajaran, maka kendaraan tersebut harus dilakukan perawatan ataupun peremajaan. Berikut merupakan contoh *print out* dari hasil kendaraan roda empat yang telah diuji emisikan:

Gambar 3.5
Tampilan *print out*



Sumber : Sub bidang Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2011.

Gambar diatas memperlihatkan kandungan zat kimia emisi kendaraan bermotor sebelum dan sesudah dilakukan uji emisi. Terlihat perbedaan yang mencolok antara gas buang kendaraan sebelum dan sesudah diuji emisi. Kadar zat kimia didalam kandungan gas yang terbuang dari asap knalpot mengalami pengurangan persentase yang cukup signifikan ketika telah diuji emisi.